



Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dengan E-Government

Erwinsyah¹, Femilia Zahra², Lucyani Meldawati³, Fikry Karim⁴, Fadli Moh Saleh⁵, Masruddin⁶

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako^{1,2,3,4,5,6}

E-mail : erwinsyahsee@untad.ac.id¹, femilia.zahra@untad.ac.id², lumed86@gmail.com³,
fikrykarim@gmail.com⁴, fmsaleh@untad.ac.id⁵, masruddin@untad.ac.id⁶

Abstrak

Desa Porame merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sigi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, kepala desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan secara transparan. Meskipun SISKEUDES telah diterapkan di Desa Porame, kendala yang dihadapi adalah kurangnya kapabilitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa Porame melalui penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Website Desa. Melalui sosialisasi dan pelatihan, diharapkan pemerintah desa mampu mengelola keuangan dengan lebih akuntabel dan transparan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai akuntabilitas keuangan desa serta kemampuan mengoperasikan SISKEUDES. Penggunaan website desa juga diimplementasikan untuk mempermudah akses informasi publik dan meningkatkan partisipasi warga.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan Desa, Transparansi; E-Government, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Desa

Abstract

Porame Village is one of the villages located in Sigi Regency. Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, village heads are required to convey financial accountability transparently. Even though SISKEUDES has been implemented in Porame Village, the obstacle faced is the lack of human resource capability in financial management. This service aims to increase accountability and transparency in the financial management of Porame Village through the use of the Village Financial System (SISKEUDES) and the Village Website. Through outreach and training, it is hoped that the village government will be able to manage finances more accountably and transparently. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of village financial accountability and the ability to operate SISKEUDES. The use of village websites is also implemented to facilitate access to public information and increase citizen participation.

Keywords: *Village Financial Accountability, Transparency; E-Government, Village Human Resource Empowerment*

Copyright (c) 2025 Erwinsyah, Femilia Zahra, Lucyani Meldawati, Fikry Karim, Fadli Moh Saleh, Masruddin

✉ Corresponding author

Address : Universitas Tadulako

Email : erwinsyahsee@untad.ac.id

DOI : 10.31004/abdidas.v6i1.1118

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, yang mencakup hingga pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini diterbitkan bertujuan untuk mendorong otonomi desa melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien, dengan bantuan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat diperhitungkan dalam unit moneter termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak kewajiban desa. Pembangunan desa yang transparan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat terbentuk dari model pengelolaan keuangan desa yang baik. Oleh karena itu, Kepala Desa diberi wewenang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sehingga pengelolaan keuangan dapat dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 telah mengatur pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Dengan kekayaan milik desa dan pengurusan keuangan dari sumber dana yang berbeda-beda, suatu pemerintah desa harus lebih mandiri untuk mengatur pemerintahannya. Namun masih sering ditemui berbagai kendala dalam

pengelolaan keuangan desa. Salah satu masalah utama adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pengembangannya yang belum memadai pada pemerintahan desa. Harahap et al. (2023) menemukan bahwa salah satu hambatan adalah pemerintah desa tidak memiliki sumber daya dengan kemampuan yang cukup dan terlatih dalam mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan desa. Guna mengatasi hal tersebut, implementasi sistem akuntansi keuangan desa melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES) dilakukan oleh pendamping desa. Hal ini menyebabkan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa menjadi rendah. Sanusi & Riyadi (2023) menemukan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh kompetensi perangkat desa yang digambarkan dari tingkat pendidikan. Keahlian dan kecakapan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang ditingkatkan dengan berbagai pelatihan menjadi faktor penentu akuntabilitas. Selain itu, rendahnya kualitas laporan keuangan desa juga disebabkan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidang (Diana Andriani Mayui et al., 2023).

Permasalahan pengelolaan keuangan desa juga berkaitan dengan prinsip transparansi. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan atas seluruh informasi atas pelayanan publik dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkannya (Saputra et al., 2024). Penelitian oleh Kurniaty (2023) menunjukkan kinerja pemerintahan desa tidak dipengaruhi oleh transparansi, meskipun ada keterbukaan terhadap warga masyarakat. Namun, informasi mengenai keuangan desa yang masih

sangat terbatas, dapat menyebabkan potensi penyalahgunaan dana desa oleh oknum perangkat desa, sehingga perangkat desa dituntut untuk menyampaikan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat. Dalam beberapa kasus, penyimpangan pengelolaan dana desa bahkan mengakibatkan kerugian besar. Sebagai contoh, Inspektorat Kabupaten Sigi menemukan bahwa kerugian negara dari dana desa di Kabupaten Sigi pada periode 2016-2023 mencapai Rp16 miliar akibat penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi.

Melihat permasalahan yang terjadi, pemerintah meluncurkan aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja serta pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) merancang Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk mendukung pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Perancangan SISKEUDES berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sehingga diharapkan dapat mempermudah proses administrasi keuangan, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, serta mempercepat proses pelaporan. Aplikasi SISKEUDES bisa mengakomodir semua peraturan terpaut dengan keuangan Desa. Tidak hanya itu, aplikasi siskeudes dikonsepkan dengan cara yang berintegrasi, *user friendly*, serta *desktop application* dan mempunyai sistem pengaturan internal yang menempel serta efisien dalam

menciptakan pelaporan data keuangan (Ramadhan & Priyanti, 2022). Furqan et al. (2023) menemukan bahwa penerapan teknologi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pembangunan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Penggunaan SISKEUDES ini juga telah dipertegas dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat nomor B.7508/01-16/08/2016 pada tanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa (Arianto & Kahpi, 2020)

Desa Porame sebagai ibu kota Kecamatan Kinovaro telah mencoba menerapkan SISKEUDES dalam mengelola keuangan desa. Walaupun demikian, pemerintah desa masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemahaman dan penerapan sistem ini secara maksimal. Oleh karena itu, tim pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa dalam penggunaan SISKEUDES untuk memaksimalkan aspek akuntabilitas dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa melalui penyusunan website sederhana. Dengan demikian, tim pengabdian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa, serta memberikan gambaran baru tentang penyampaian informasi kepada masyarakat secara digital.

METODE

Pemerintah Desa Porame telah menyetujui untuk mengikuti program peningkatan

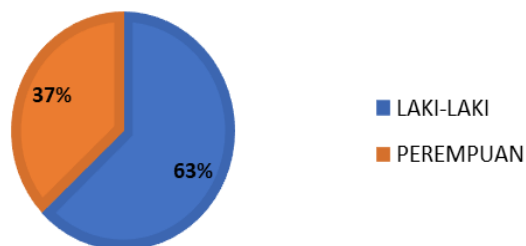
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Komunikasi awal dengan Pemerintah Desa Porame diawali dengan penggalian informasi tentang kebutuhan utama dari aparat desa yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi. Setelah itu, Tim Pengabdian melakukan melaksanakan sosialisasi kepada perangkat desa agar dapat memberikan pemahaman lebih mengenai fitur dan tata cara penggunaan SISKEUDES serta memperkenalkan website desa sebagai sarana transparansi.

Beberapa metode seperti *brainstorming*, *tutorial* dan diskusi digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini. Perangkat desa diberikan penjelasan kepada perangkat desa tentang peraturan, standar dalam pengelolaan keuangan desa dan konsep laporan keuangan selama proses *brainstorming*. Selain itu, perangkat desa juga diberikan penjelasan mengenai konsep dasar pembuatan website desa menggunakan google site untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan administrasi dan informasi keuangan desa. Metode tutorial dilakukan dengan memberikan instruksi teknis atau penjelasan tentang langkah-langkah mengoperasikan aplikasi SISKEUDES untuk penyusunan laporan keuangan. Perangkat desa juga diberikan pemahaman melalui praktik penyajian informasi keuangan ke dalam google site. Perangkat desa diberikan kesempatan untuk berbicara tentang masalah yang dihadapi dalam penggunaan SISKEUDES dimulai dari aspek perencanaan hingga pertanggungjawaban serta kendala dalam memahami penggunaan google site.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Porame berjarak 14 Km dari ibukota Kabupaten Sigi, memiliki luas area mencapai 20,48 km² dengan jumlah penduduk mencapai 1874 orang. Desa Porame berdiri dari tahun 1902, nama desa muncul dari kata “Po” dan “Rame”. “PO” berarti persatuan orang-orang atau para Tadulako dalam melakukan musyawarah mencapai mufakat untuk melakukan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan “RAME” berarti pesta atau kegiatan ritual adat yang dipusatkan pada tempat pemukiman penduduk untuk merayakan sebuah kemenangan dalam perjuangan secara bersama-sama.

Kondisi pemerintahan Desa Porame dipimpin oleh Kepala Desa serta dibantu dengan 12 orang pegawai. Wilayah pemerintahan pada Desa Porame terdiri atas 10 Rukun Tetangga (RT). Sebagian besar masyarakat dalam wilayah Desa Porame bercocok tanam tanaman buah semusim seperti bawang merah, cabai rawit, tomat dan bawang putih. Kegiatan Pengabdian yang dilaksanakan di Tridea Hills, Desa Porame, Kabupaten Sigi, dihadiri oleh 12 peserta yang terdiri dari perangkat Desa Porame. Perangkat desa yang turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya pengguna langsung SISKEUDES yaitu kepala urusan keuangan dan operator SISKEUDES, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Aparat Desa lainnya. Adapun rincian jumlah pesertanya disajikan dalam diagram berikut :



Gambar 1. Diagram Jumlah Peserta

Dalam pelaksanaan SISKUEDES, pengelolaan dan pengurusan keuangan desa masih dipengaruhi oleh beberapa aspek misalnya kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa serta alat infrastruktur desa semacam komputer maupun laptop untuk menunjang pelaksanaan SISKEUDES di Desa (Rivan & Maksum, 2019). Pendampingan diawali dengan penyampaian materi terhadap peserta berupa pemahaman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan pengenalan fitur dan fungsi aplikasi SISKEUDES, penyusunan laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Pemaparan materi dilanjutkan dengan praktek langsung terhadap SISKEUDES. Pemateri melakukan evaluasi terhadap keefektifan materi yang disampaikan dengan melakukan pre test dan post test seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pre Test	55.3846	13	12.65924	3.51104
	Post Test	79.6154	13	5.18875	1.43910

Dari tabel di atas, terdapat perbedaan skor rata-rata antara pre test dan post test. Nilai rata-rata sebelum kegiatan dimulai adalah 55,38 dan

setelah kegiatan adalah 79,62. Terdapat kenaikan skor rata-rata yang menunjukkan bahwa peserta kegiatan telah memahami konsep akuntabilitas dengan cukup baik atau dapat penyerapan materi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian. Pengujian dengan paired sampel t-test menunjukkan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal (pre test) dan variabel akhir (post test). Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel yaitu saat sebelum memberikan materi dan sesudah tim pengabdian melakukan pemberian materi.

Tabel 2. Hasil Uji Beda (Uji T)

Paired Samples Test								
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper		
Pair 1	Pre-Test - Post-Test	-24.23077	11.51921	3.19486	-31.19176	-17.26978	-7.584	.000

Hasil dari pelatihan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan desa. Peserta juga mampu mengoperasikan SISKEUDES dengan lebih baik, termasuk dalam hal penginputan data, perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan. Keberhasilan pelatihan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan pemahaman teknis, tetapi juga memperkuat kesadaran perangkat desa terhadap pentingnya tata kelola keuangan yang baik dalam membangun kepercayaan publik. Salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi yakni tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimana

akuntabilitas menjadi salah satu pilar tata kelola tersebut. SISKEUDES membantu pemerintah desa dalam melaporkan pengelolaan keuangan desa secara integritas. Semakin baik pada pengoperasian serta pemakaian aplikasi SISKEUDES, semakin akuntabel pula dalam pengelolaan anggaran Desa (Arfiansyah, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arianto & Kahpi (2020) di desa Tompobulu, Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai menunjukkan bahwa data yang telah terposting ke SISKEUDES tidak dapat dirubah tanpa sepengetahuan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sistem ini membantu mencegah terjadinya kecurangan, Melalui penggunaan SISKEUDES, pemerintah desa diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu meminimalkan risiko penyimpangan atau ketidakakuratan dalam pengelolaan anggaran desa. Hal ini penting karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sering kali bergantung pada sejauh mana anggaran desa dikelola dengan baik dan digunakan secara efektif untuk kepentingan umum. Sistem keuangan desa akan memberikan keuntungan bagi pemerintah desa untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang membutuhkan (Faizah & Retnosari, 2022).



Gambar 2. Kegiatan Pemaparan Materi

Selain pelatihan penggunaan SISKEUDES, kegiatan pengabdian ini juga melibatkan pembuatan dan pengelolaan website Desa Porame (dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/desaporamesigi>). Di era globalisasi ini, sistem teknologi informasi menjadi hal yang penting serta menjadi penunjang kebutuhan dan kehidupan manusia. Salah satu media informasi paling efektif untuk penyebaran informasi yaitu Internet yang dapat digunakan sebagai pemecahan masalah yang melibatkan masyarakat. Berdasarkan UU RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 86, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Menurut Nabilah (2017) yang dikutip dalam Abbas & Sutrisno (2022) penerapan *website* dimaksudkan sebagai upaya aparat pemerintah desa dalam mengembangkan pemerintahan yang berbasis elektronik demi meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. *Website* ini dirancang sebagai platform yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai anggaran desa, program-program pembangunan, dan layanan publik. Pengembangan *website* desa ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa serta mempromosikan potensi yang dimiliki desa seperti tempat wisata atau hal ini juga biasa disebut *e-tourism*. Hanief et al (2018) dalam Airlangga et al. (2020) menyatakan bahwa wisata yang dikelola dengan berbasis teknologi informasi adalah pola kerja baru pemerintah, dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat akan membantu suatu

desa untuk mengelola wisata berbasis teknologi. Masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor desa untuk mendapatkan informasi, melainkan dapat mengaksesnya secara online kapan saja dan di mana saja. Ini sangat relevan dengan era digitalisasi saat ini, di mana akses informasi secara cepat dan transparan sangat dibutuhkan. Maka dari itu diperlukan pengelolaan *website* yang optimal agar dapat memberikan manfaat yang maksimal (Fattah & Azis, 2020).

Melalui *website* desa, masyarakat dapat melihat langsung rincian anggaran desa, seperti alokasi dana desa, rencana penggunaan anggaran, dan laporan realisasi anggaran. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat partisipasi aktif dalam proses pemerintahan desa. *Website* ini juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi terkait kebijakan desa, menyampaikan aspirasi, serta memberikan saran atau kritik terkait program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Untuk tampilan *Website* yang telah dibuat seperti gambar berikut :

The image shows a web application interface for 'Desa Porame'. On the left is a dark sidebar with a menu including: HOME, PROFIL, LEMBAGA, STRUKTUR, TRANSPARANSI ANGGARAN, INFORMASI PUBLIK, PRODUK HUKUM, CEK TACIHAN ONLINE, JARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT, PEMBUATAN SURAT, and LAPOR. The main content area has a header 'ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJAR DESA 2024' and displays a table of financial data.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJAR DESA 2024	
TOTAL PENDAPATAN	Rp 1.502.298.744,00
DANA DESA BERKASER DARI APBN	Rp 752.148.000,00
PAJAK DAN DESA	Rp 386.334.000,00
DARI HAZEL, PAJAK DAN RETRIBUSI	Rp 14.759.270,00
PENDAPAT LAIN-LAIN	Rp 1.352.056,00
TOTAL BELAJAR	Rp 1.502.298.744,00
REANG PEMBELANJAKAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 915.084.200,00
PEMBELANJAKAN BELAJAR SELAP TANGKUPAN DAN OPERASIONAL, PEMERINTAHAN DESA	Rp 477.155.710,00
PEMBELANJAKAN KEMENTERIAN, KEMENTERIAN, PENGADAAN BPN, STATISTIK DAN KEARIFAN	Rp 70.338.000,00
PEMBELANJAKAN DESA TOLAK PEMERINTAHAN, PEMERINTAHAN, PENGADAAN DAN PELAYANAN	Rp 1.352.056,00
REANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 300.000.000,00
SUB BAGAS PEMERINTAHAN	Rp 80.000.000,00
SUB BAGAS KEMENTERIAN	Rp 180.000.000,00
SUB BAGAS PENGADAAN BPN DAN PENGADAAN BPN	Rp 40.000.000,00
SUB BAGAS PENGADAAN BPN	Rp 40.000.000,00
SUB BAGAS PENGADAAN BPN DAN PENGADAAN BPN	Rp 1.000.000,00
REANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT	Rp 170.000.000,00
SUB BAGAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT	Rp 100.000.000,00
SUB BAGAS PENGADAAN BPN DAN PENGADAAN BPN	Rp 10.000.000,00
SUB BAGAS PENGADAAN BPN DAN PENGADAAN BPN	Rp 10.000.000,00
REANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT	Rp 100.000.000,00
SUB BAGAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT	Rp 100.000.000,00

Gambar 3. Tampilan Website

Partisipasi aktif masyarakat ini sangat penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang inklusif dan partisipatif. Dengan adanya Website Desa, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa, serta memiliki peran aktif dalam mengawasi implementasi kebijakan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang menekankan pentingnya partisipasi publik, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap proses pemerintahan.

Kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, peserta kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan teknis dalam menggunakan SISKEUDES, yang secara langsung meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Kedua, Website Desa berhasil diluncurkan sebagai platform transparansi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Ketiga, kegiatan ini berhasil menciptakan lingkungan yang lebih partisipatif, di mana masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam pengawasan anggaran dan pengambilan keputusan di desa. Diharapkan *website* desa tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya menjadi media informasi serta media promosi potensi desa (Marliana et al., 2022). Kegiatan yang dilakukan dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui digitalisasi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pengelolaan keuangan desa yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong pembangunan desa yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, program pengabdian ini tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, tetapi juga pada perubahan budaya dan pola pikir terkait tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan partisipatif.

Lebih jauh lagi, kesuksesan program ini membuka peluang untuk diadakannya pendampingan jangka panjang guna memastikan bahwa pengelola desa dapat terus mempertahankan kemampuan dan pengetahuan yang telah diperoleh. Program semacam ini juga dapat disesuaikan dan diterapkan di desa-desa lain yang mengalami kendala serupa, dengan harapan mampu menciptakan desa-desa yang lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian di Desa Porame, Kabupaten Sigi, berhasil meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan melalui pelatihan penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Selain itu, kegiatan ini meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa melalui pembuatan website Desa. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta, yang tercermin dari perbedaan hasil pre-test dan post-test. Selain peningkatan kemampuan teknis, peluncuran Website memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Keberhasilan program ini diharapkan menjadi model bagi desa-desa lain untuk mendorong

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, W., & Sutrisno, S. (2022). Pengembangan Website Desa sebagai Sistem Informasi dan Inovasi di Desa Indu Makkombong, Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 505–512. <https://doi.org/10.54082/jamsi.276>
- Airlangga, P., Harianto, H., & Abdullah Hammami, R. (2020). Pembuatan dan Pelatihan Pengoperasian Website Desa Agrowisata Gondangmanis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Informatika*, 1(1), 2774–8529.
- Arianto, A., & Kahpi, A. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2(2), 183–194.
- Arief Arfiansyah, M. (2020). Journal of Islamic Finance and Accounting Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Diana Andriani Mayui, D., Yusnita Yamin, N., & Ilham Pakawaru, M. (2023). Quality of Financial Reports: Education Level, Accounting Understanding, and Work Experience of Village Apparatus (Study on Village Governments in Pamona Puselemba District, Poso Regency, Central Sulawesi). *Proceeding Medan International Conference Economics and Business*, 1, 591–601.
- Faizah, A., & Retnosari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Fattah, F., & Azis, H. (2020). Pemanfaatan Website Sebagai Media Penyebaran

- 150 *Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Dengan E-Government – Erwinsyah, Femilia Zahra, Lucyani Meldawati, Fikry Karim, Fadli Moh Saleh, Masruddin*
DOI: 10.31004/abdidas.v6i1.1118
- Informasi. *Ilmu Komputer Untuk Masyarakat*, 1(1), 15–20. www.desatonasa.com
- Furqan, A. C., Karim, F., Yuniar, L. S., Gunarsa, A., & Erwinsyah. (2023). The effects of information and communication technology on village development performance. *International Journal of Data and Network Science*, 7(4), 1941–1948. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.6.018>
- Harahap, R., Arif Lubis, F., & Daim Harahap, R. (2023). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas). *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 199–207. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.876>
- Kurniaty, H. (2023). The Effect of Transparency and Accountability in Management of Village Funds on the Performance of the Pamait Village Government in South Barito District Year 2022. *Pencerah Publik*, 10(1), 1–12. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah>
- Marliana, R. R., Sejati, W., Nisa, W. A., Pujayanti, U., Sopian, R., & Noergana, W. (2022). Rancang Bangun Website Desa Citengah untuk Pengembangan Promosi Potensi Desa. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 6(1), 193–197. <https://doi.org/10.30595/jppm.v6i1.7667>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20 (2018). www.peraturan.go.id
- Rivan, A., & Ridwan Maksum, I. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 2019. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Rizki Ramadhan, K., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 2598–9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3572/http>
- Sanusi, S., & Riyadi, P. (2023). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Ilmiah Akuntansi*, 11(2), 91–106.
- Saputra, Y., Sekar Sari, M., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(7), 56–70. <https://djp.kemenkeu.go.id>